

penentu. Elit formal kalah bersaing atau kalah kuat ketimbang elit informal sehingga dalam proses penyusunan APBD yang jadi penentu adalah informal.

Politik Anggaran

Anggaran diartikan sebagai rencana yang memuat pengeluaran negara yang diusulkan untuk periode tertentu dan maksud tertentu serta pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran tadi (*proyek*). Konteks APBD, anggaran merupakan anggaran publik yang menjadi instrumen penyelesaian dari kewenangan legislatif. Goldenhuys (1997) menyatakan Anggaran merupakan penyiapan dokumen politik dimana uangnya pantas sesuai nilai keputusan dan proses anggaran adalah proses politik dimana mengambil tempat dalam arena politik (*the budget process is a political process that takes place within a political arena*)

Kemudian di dalam proses penyusunan anggaran satu sisi menjadi komitmen lembaga formal, pemerintah daerah dan DPRD namun juga dipengaruhi oleh aktor-aktor di luar kelembagaan (*outsider actors*). Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran ini selalu memperlihatkan kecakapan mereka ketika negosiasi dan *bargaining*.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian fenomenologis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan; (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang dihadapi.

b. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu dengan mempertimbangkan alasan posisional proporsi besaran APBD daerah tersebut, dimana APBD terbesar, menengah dan terkecil di Kota Pekanbaru. Untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul ”Konfigurasi aktor Politik Lokal ; Studi Politik Keuangan Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014”, peneliti mengambil lokus lebih spesifik di sekretariat pemerintah daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, DPRD tiga wilayah tersebut.

c. Subyek Penelitian

Besarnya jumlah informan sebagai obyek penelitian tidak dapat ditentukan, namun hanya bisa dibedakan menurut karakteristiknya. Informan penelitian ini meliputi berbagai macam, seperti (1) informan kunci (key informan), yaitu Kepala Daerah, Ketua DPRD, ketua, wakil ketua dan sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ketua Badan Anggaran (BANGGAR), elite partai politik, ketua tim sukses (2) informan utama, yaitu anggota badan anggaran, anggota TAPD, pimpinan fraksi dan komisi DPRD ketiga daerah tersebut serta anggota tim sukses kepala daerah, (3) informan tambahan, yaitu masyarakat

d. Jenis Data

Data Utama

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan. Dalam hal ini, data – data tersebut akan kami peroleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan yang akan kami lakukan terhadap subyek – subyek penelitian yang telah ditentukan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Data Tambahan

Data tambahan berupa dokumen-dokumen penganggaran seperti APBD tahun 2011-2014, Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2011-2014, ringkasan APBD tahun 2011-2014, hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun bersangkutan.

e. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua macam pengumpulan data secara kualitatif, yakni *in-depth interview* (wawancara mendalam) dan penelaahan terhadap dokumen tertulis.

Pertama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dan terbuka. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Penulis melakukan wawancara dengan informan kemudian mencatat dan mentranskrip percakapan atau informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara dengan informan, penulis menggunakan tape-recorder sebagai alat untuk merekam pembicaraan selama proses wawancara berlangsung.

Kedua, penelaahan terhadap dokumen tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku harian pribadi; dan jawaban tertulis yang terbuka

terhadap kuesioner dan survey³. Dokumen tertulis yang dijadikan data oleh penulis antara lain; SK tim anggaran dan panitia anggaran Pekanbaru, Permendagri 13 tahun 2006, RPJMD 2011-2014, APBD 2011-2014, KUA-PPAS 2011-2014, RAPBD 2011-2014, APBD 2011-2014, Ringkasan Penjabaran APBD 2011-2014, Keputusan Walikota Pekanbaru dan pelbagai notulensi rapat dan pertemuan informal.

f. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah secara kualitatif seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dan dokumen pribadi. Analisa data ini didasarkan pada suatu upaya dan pertimbangan bahwa setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian maka selanjutnya data akan dianalisis untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga diharapkan dapat berguna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengakatagorikan berbagai data yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data dari proses pengaturan, pengaturan, pengelompokan dan pengakatagorian hingga berbentuk suatu uraian atau narasi yang mudah dibaca dan dipahami, baik dalam bentuk kata, kalimat dan paragraf⁴. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dan samapai pada verifikasi data atau simpulan.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktor Yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan Anggaran

Aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu *outsider actor* dan *insider actor*. *Outsider actor* merupakan aktor di luar institusi pemerintah, sedangkan *insider actor* merupakan aktor yang berasal dari internal pemerintah. Proses penyusunan anggaran dimulai dari MUSRENBANGDA dan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS), dimana melibatkan aktor formal dan informal. Aktor formal terdiri dari masing-masing SKPD, 12 camat dan instansi pemerintah lainnya. Kemudian untuk aktor informal terdiri ormas-ormas, asosiasi-asosiasi, NGO's dan kelompok kepentingan asosiasional serta lembaga akademis. Di dalam proses musrenbang melibatkan aktor formal mulai dari camat hingga SKPD dan unprosedural mulai dari akademisi, asosiasi-asosiasi dan ormas. Jadi tidak hanya

³ *Op.cit.* Hal 159-163

⁴ *Ibid.* Hal 280-281

⁵ *Ibid.* Hal 288-295

melibatkan aktor formal tetapi juga aktor informal yang mewarnai proses musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu aktor informal juga terdiri dari tim ahli SKPD, tim ini mendampingi BAPPEDA dalam proses penyusunan anggaran.

Mekanisme Formal

Mekanisme formal negosiasi kepentingan eksekutif-legislatif dilakukan melalui rapat-rapat atau forum-forum pembahasan resmi. Forum-forum resmi ini dimulai dari rapat-rapat pendahuluan kemudian dibahas oleh pimpinan DPRD, selanjutnya dibawa ke tingkat komisi. Setelah itu pimpinan dewan mengumpulkan panitia anggaran kemudian dilanjutkan dengan rapat gabungan panitia anggaran dan komisi serta fraksi. Apabila di tahapan ini telah selesai ada rapat di tingkat panitia anggaran, baru setelah itu diadakan rapat paripurna.

Sedangkan tim anggaran pemerintah daerah menguraikan mekanisme dilakukan melalui empat tahapan, yakni penyerahan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tanggapan dewan, pertanyaan-pertanyaan dari dewan, walikota menjawab. Dari empat tahapan forum-forum rapat yang telah disebutkan diatas, ada negosiasi-negosiasi dalam bentuk lobyng-lobyng yang dimasukkan dalam proses resmi tersebut. Lobyng-lobyng tersebut dilaksanakan pada tahapan kedua, yakni tanggapan dari dewan. Dalam tahapan ini dilakukan lobyng guna memuluskan draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sehingga tanggapan dari dewan adalah tanggapan positif. Lobyng tersebut dalam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan komisi terkait.

Mekanisme Informal

Selain penggunaan mekanisme formal dalam menegosiasikan kepentingan eksekutif dan legislatif, ada mekanisme lain yang digunakan yakni mekanisme informal. Hasil dari mekanisme informal biasanya lebih mengena dan efektif ketimbang mekanisme formal. Mekanisme informal bisa berupa hal-hal berikut (a) dengan menggunakan pendekatan personal antara anggota dewan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja, (b) pimpinan panitia anggaran dengan pimpinan tim anggaran eksekutif dan (c) anggota dewan menitipkan kepada staf Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pertama, yakni dengan menggunakan pendekatan personal antara anggota dewan terutama dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja. Hal ini dilakukan oleh setiap komisi terkait dengan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mitra kerja guna memuluskan kepentingan dari legislatif maupun sebaliknya. Selain penuturan dari informan yang berasal dari Badan Anggaran. Penulis juga mendapatkan informasi mengenai cara negosiasi secara informal dari pihak eksekutif.

Cara negosiasi informal adalah dengan cara loby-loby. Loby-loby tersebut dilaksanakan sebelum mekanisme formal dilaksanakan. Loby-loby tersebut dilakukan oleh anggota dewan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Loby-loby tersebut dilakukan untuk menacapai kesepakatan diantara perbedaan kepentingan yang *win-win solution*

Cara negosiasi informal cara ini digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah guna memuluskan anggaran atau program atau proyek-proyek yang diusulkan. Kadangkala proyek atau program atau anggaran ketika diusulkan kepada tim anggaran eksekutif ditolak atau tidak mendapat persetujuan karena beberapa hal misalnya, bukan program prioritas atau kepentingan eksekutif yang penting. Oleh sebab itu pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menitipkan atau menjalin komunikasi dengan komisi mitra kerja untuk memuluskan usulan program atau proyek atau anggaran yang kemudian diteruskan ke panitia anggaran.

Ketiga, anggota dewan menitipkan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan/kepentingan legislatif kepada staf Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disini anggota dewan tidak melalui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pimpinan panitia anggaran.

Interaksi Antar Aktor dalam Proses Penyusunan Anggaran

Selain aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran melalui dua mekanisme yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, ada juga aktor-aktor yang berinteraksi diluar dua mekanisme tersebut. Aktor-aktor ini merupakan aktor informal yang sangat kuat pengaruhnya, dimana *memback up* para aktor yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Aktor-aktor tersebut diantaranya adalah elite parpol, tokoh kultural, birokrasi dan rekanan.

Elit parpol merupakan pengurus inti dan pemilik partai pendukung Bupati, tokoh kultural adalah kyai yang mewarnai kehidupan di Pekanbaru yang bersifat paternalistik dan patrimonial, birokrasi adalah salah satu pihak yang dominan karena keahliannya dan terakhir rekanan. Rekanan disini bisa dibagi dua, yakni rekanan skala besar dan rekanan yang bergantung pada parpol atau penguasa. Rekanan ini masuk dan bekerja sama dengan masing-masing SKPD. SKPD mau bekerja sama ada dua alasan, yakni karena kualitas kerjanya bagus dan rekanan mempunyai *back up* dari tokoh informal yang sangat berpengaruh.

Pola Interaksi Aktor dalam Proses Penyusunan Anggaran

Bila dilihat dari intensitas keterlibatan dalam penyusunan anggaran. Pelbagai aktor-aktor yang telah diuraikan diatas bersama-sama menyusun dokumen KUA-PPAS, perdebatan distribusi dan alokasi untuk eksekutif, legislatif maupun elit-elit yang menjadi penentu.

Selanjutnya beranjak pada pola interaksi *stakeholder* dalam proses penyusunan anggaran. Di satu sisi sangat partisipatif dan akomodatif, dimana semua *stakeholder* terlibat dalam proses penyusunan anggaran dari awal hingga akhir tanpa adanya kooptasi dari salah satu kekuatan lainnya. Semua aktor atau *stakeholder* mempunyai hak sama dalam penyusunan anggaran, tidak ada pihak yang mendominasi baik dari KUA-PPAS hingga penetapan APBD. Di dalam proses penyusunan RKPD ini menggunakan metode baru yaitu asistensi yang melibatkan pelbagai kekuatan di Pekanbaru.

Disisi lain ada hal yang bertolak belakang dengan pernyataan diatas, ternyata ada *stakeholder* yang dominan, yakni *outsider actor*, seperti orang yang punya parpol. Parpol disini tentunya adalah partai pengusung Walikota. Pola interaksi juga dilihat dari permanen atau tidaknya hubungan yang dibangun oleh para *stakeholder* atau aktor dalam penyusunan anggaran. Pada awalnya mereka bertemu dalam forum resmi, dimana hanya formalitas belaka, selebihnya diselesaikan di luar forum resmi. Salah satu aktor yang membentuk pola interaksi adalah rekanan, rekanan seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dua yaitu rekanan kuat dan rekanan lemah. Rekanan kuat bertemunya dengan birokrasi dan kekuatan lain yang kuat serta di tengah-tengahnya ada walikota. Walikota selaku penguasa nampak tidak berdaya, dia sangat bergantung pada kekuatan di baliknya. Pada hakekatnya kekuatan di belakang Bupati adalah partai pengusung, tetapi tidak hanya terbatas itu tetapi masih ada sayapnya, yakni rekanan bilak dikaitkan dengan proyek.

Pola interaksi yang terjadi kelihatan tidak permanen. Mekanisme yang digunakan bersifat tidak resmi tetapi tetap dibahas secara resmi. Aktor yang berperan disini adalah rekanan dengan beberapa kategori, yakni kuat dan lemah dan partai pengusung (termasuk sayapnya) dengan mengitari bupati sebagai porosnya.

Pola interaksi selanjutnya adalah tim non pemerintah dengan TAPD. Tim non pemerintah acapkali mendapatkan mandat secara langsung dari walikota sehingga mereka mempunyai sedikit kewenangan lebih untuk mengcut rencana kegiatan atau program yang dibuat TAPD apabila tidak sesuai dengan visi dan misi bupati. Implikasinya adalah ada TAPD yang terbuka dan resisten dengan adanya tim ini.

Pola interaksi yang terjadi diantara walikota dengan tim sukses nampak pada penentuan orang yang menjadi tim ahli. Latar belakang yang muncul terkait dengan siapa yang menduduki atau menjadi bagian elite parpol. Disisi lain juga muncul alasan untuk membangun *bargaining* dan mendapatkan kepentingan pribadi berupa proyek-proyek.

Aktor terpolarisasi menjadi beberapa, yakni birokrasi dan partai pengusung. Namun partai pengusung ini tidak jelas konsepsinya seperti apa. Apakah yang mendukung pasangan kepala daerah ataukah hanya segelintir elit parpol. Ketika aktor-aktor sudah nampak dalam proses penyusunan anggaran, maka akan terbentuk suatu konfigurasi aktor politik lokal. Konfigurasi aktor ini memang sudah ada sehingga

tidak membentuk suatu kekuatan baru. Bila dikontekskan dalam proses penyusunan anggaran, kekuatan baru tidak terbentuk karena hanya bersifat insidental. Selain itu dari pelbagai kekuatan yang ada secara serentak bekerja sama dalam proses penyusunan, baik pengusung maupun yang tidak mengusung.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Aktor-aktor yang berinteraksi dalam penyusunan anggaran adalah aktor formal dengan informal, antar aktor formal dan antar aktor informal. Selain aktor yang telah dijelaskan pada poin pertama, muncul aktor lain kuat pengaruhnya di dalam proses penyusunan anggaran, yaitu pemilik partai politik dan rekanan. Interaksi disini tidak hanya aktor-aktor yang terlibat secara langsung melainkan juga di balik layar dalam penyusunan anggaran. Pola interaksi dari segi permanen dan tidak permanennya hubungan yang dijalin. Pada awalnya bertemu melalui forum-forum resmi namun penyelesaiannya tetap di luar forum tersebut. Selanjutnya pola interaksi antara TAPD dengan tim ahli melalui forum tidak resmi. Tim ini mendapatkan mandat dari walikota sehingga dapat memotong apa yang tidak sesuai dengan visi dan misi. Disisi lain ada juga interaksi antara Walikota dengan tim sukses. Setelah terbentuk pola interaksi maka akan berlanjut pada polarisasi kekuatan atau aktor politik lokal dalam proses penyusunan anggaran. Di dalam proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua aktor besar, yakni partai pengusung dan birokrasi. Konfigurasi yang terjadi bukanlah kekuatan baru melainkan sudah ada sebelumnya. Semua aktor dan kekuatan politik lokal, baik pengusung, non pengusung dan kekuatan lain merapatkan barisan untuk mengamankan dokumen yang telah disepakati.

b. Saran

Dalam proses penyusunan anggaran harus seimbang antara mekanisme formal dan non formal tidak boleh ada yang mendominasi antara satu kekuatan dengan kekuatan lain atau mekanisme satu dengan yang lain. Semua kekuatan politik lokal harus mampu harmoni dan menjalankan fungsinya guna mewujudkan penganggaran sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah. Peneliti memandang bahwa Kepala Daerah atau eksekutif tidak menampakkan kelemahan, ketakutan, kegamangan dan ketundukan kepada pihak lain atau *outsider actor* dalam mekanisme formal perencanaan pembangunan. Dengan kata lain, mekanisme formal tidak boleh terintervensi oleh mekanisme non formal. Di dalam mekanisme formal proses penyusunan anggaran, aktor informal dimasukkan ke dalam pedoman penyusunan sehingga tidak lagi mereka yang tidak berwenang secara kelembagaan membentuk akses formal untuk terlibat dalam proses ini, sehingga kepentingan-kepentingan terselubung, baik pribadi maupun lembaga dapat tereliminasi karena sudah dilegalkan melalui format atau prosedur baku tidak seperti sekarang ini, yang masih carut marut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji , Firman B. dan Sirait, Martin.1982.PDE Perencanaan dan Evaluasi;Suatu sistem Untuk Proyek Pembangunan.Jakarta:Bina Aksara.
- Denzin, K.Norman dan Lincoln, S. Yvonna.2009.Handbook Of Qualitative Reseaech.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Diharna.2008.Administrasi Pemerintahan Daerah..Cirebon:Swagati Press
- Lembaga Administrasi Negara.2003.Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jakarta:Perum Percetakan Negara RI
- Madani, Muhlis.2011.Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Moleong, Lexi J..2010.Metode Penelitian Kualitatif;Edisi Revisi.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Nitisastro, Widjojo.2010.Pengalaman Pembangunan Indonesia:Kumpulan Tulisan Dan Uraian.Jakarta:Gramedia
- Prasetyo, Budi.2006.Partisipasi Politik Lokal;Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif.Surabaya:Karya Indah Press
- Prasetyo, Budi.2009.Pemberdayaan Masyarakat;Pembangunan Manusia Dalam Politik Lokal.Surabaya:Lutfansah Mediatama
- Rasyid, Ryaas, Gaffar, M. Affan, Syaukani.2000.Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sabarno, Hari.2008.Untaian Pemikiran Otonomi Daerah:Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa.Jakarta:Sinar Grafika
- Surbakti, Ramlan.1992.Memahami Ilmu Politik.Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Suyanto, Bagong dan Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial.Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Wasistiono, Sadu.2002.Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.Bandung:Fokus Media

Internet

<http://kendariexpress.com/content/view/4923/32/>, diakses tanggal 12 januari 2011 jam 11.23

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21090/4/Chapter%20I.pdf>.diakses tanggal 12 januari 2011 jam 11.23

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17443/4/Chapter%20I.pdf>.diakses tanggal 17 april 2011

<http://www.pemiluindonesia.com/pemilukada/kpu-tetapkan-daulad-menangkan-pilkada-situbondo.html>. diakses tanggal 17 april 2011

http://www.yappika.or.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=52&Itemid=94,diakses tanggal 17 april 2011

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17443/4/Chapter%20I.pdf>,diakses tanggal 17 april 2011

Jurnal

Jurnal Majalah Perencanaan Pembangunan.Edisi 24 t ahun 20011Said Zainal Abidin.”Sistem Pengelolaan Pemerintahan Daerah Dalam Era Reformasi”

Jurnal Ire’ Sinsight Working Paper/EKO /IV/June/2008.Eko,Sutoro.”Pro Poor Budgeting:Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah Untuk Pengurangan Kemiskinan”

Jurnal INDEF’s Policy Assessment. September 1998.”Gejolak Tuntutan Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi Politik Dan Implikasinya”

Jurnal Administrasi Negara, Vol. I, No. 1, September 2000. Trilaksono Nugroho.
“Reformasi Dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perspektif
Hubungan Pemerintah Pusat-Daerah”

Artikel

Atmoko, Tjipto. Partisipasi Publik Dan Birokratisme Pembangunan

Prasetyo, Ngesti D.. “Proses-Proses Demokratisasi dalam Pembuatan Kebijakan
Publik : Wilayah Studi Kabupaten Malang”

